PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. H. Agus Salim No. 39 Madiun –Telepon : (0351) – 469020
Website http://www.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN
NOMOR : 060/10/401.115/2022

TENTANG
RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun maka masing-masing Perangkat Daerah perlu untuk menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun tentang Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2022

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedomas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN TENTANG RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN TAHUN 2022**

PERTAMA : Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 6 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN

Drs. HERI WASANA
Pembina Utama Muda
NIP. 9660422 199303 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN
NOMOR : 060/10/401.115/2022
TANGGAL : 6 Januari 2022

RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN

Area Perubahan	Isu Permasalahan Strategis	Rencana Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Manajemen perubahan	Peran pimpinan dan pegawai dalam implementasi reformasi belum optimal	Penyusunan Rencana Kerja PMPRB												
	Tim Reformasi Birokrasi belum melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja secara berkala	Pelaksanaan rencana kerja oleh Tim RB												
		Sosialisai Rencana Kerja RB ke seluruh pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun												
	Moitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja belum dilakukan secara berkala	Monitoring dan evaluasi rencana kerja Reformasi Birokasi												
		Penyusunan Rencana Aksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun												

		Informasi tentang RATL dalam rapat pimpinan												
	Agen Perubahan belum menunjukkan peran serta aktif dalam menerapkan tanggung jawabnya	Penunjukan Agen Perubahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun												
	Rencana Aksi tindak lanjut belum dilaksanakan	Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut dalam rapat pimpinan												
		Informasi tentang RATL dalam rapat pimpinan												
Pentaan Peraturan Perundang-undangan	Evaluasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis belum dilakukan secara berkala	Menyusun peta/matrik peraturan perundangan yang tidak harmonis												
	Penyempurnaan peraturan perundang-undangan belum optimal	Menyusun peraturan perundang mengikuti peraturan terbaru												
Penataan Kelembagaan/Penguatan Organisasi	Evaluasi organisasi dan analisis duplikasi fungsi masih sebatas pembahasan dengan Bagian Organisasi, belum dilakukan secara khusus oleh internal	Evaluasi organisasi mengikuti peraturan terbaru												
	Evaluasi kinerja organisasi belum selesai dilaksanakan	Monitoring evaluasi kinerja organisasi												

Penataan Tatalaksana	SOP yang tidak sesuai dengan Proses Bisnis	Menyesuaikan SOP yang ada dengan peta proses bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun												
	Monitoring dan evaluasi SOP tidak dilakukan secara berkala	Monitoring dan evaluasi SOP/peta proses bisnis												
	Pengembangan inovasi e-government masih belum optimal	Pemanfaatan aplikasi SIM HP untuk dokumentasi pemeriksaan												
Penataan SDM Aparatur/Sistem Manajemen SDM	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum sepenuhnya sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	Monitoring dan evaluasi pengembangan dan kompetensi pegawai												
	Monev Pelaksanaan keerbukaan informasi publik tidak dilakukan secara berkala	Monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala												
	Kebutuhan pengembangan kompetensi belum dilakukan secara menyeluruh	Penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi dilaksanakan secara menyeluruh												
	Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum sesuai kinerja yang dilakukan	Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sesuai dengan kinerja yang dihasilkan												

	Penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pengembangan karir individu	Monitoring dan evaluasi penilaian kinerja individu											
		Pemberian rewad dan punishment terhadap seluruh pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja individu											
	Monev pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku belum dilakukan	Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin pegawai											
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Peran pimpinan dalam penyusunan rencana strategis, PK dan pemantauan capaiak kinerja belum optimal dilakukan	Melibatkan pimpinan dalam penyusunan Renstra, Renja, PK											
		Monitoring dan evaluasi capaian kinerja oleh pimpinan langsung											
Peningkatan Pengawasan	Aparat Pengawasan Inten Pemerintah (APIP)	Penyusunan Kebijakan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Perwal) Tahun 2021											
		Peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3											
		Monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi											

	Sistem pengendalian gratifikasi belum optimal dilaksanakan	Monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi												
	Evaluasi penerapan SPI belum dilaksanakan secara optimal	Monitoring dan evaluasi SPI												
	Penanganan benturan kepentingan belum optimal disosialisasikan	Monitoring dan evaluasi benturan kepentingan												
	Implementasi pembangunan zona integritas belum optimal	Evaluasi LHKASN												
	Penanganan pengaduan masyarakat belum optimal dilakukan pelayanan belum optimal	Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat												
	Pelayanan publik masih belum memanfaatkan teknologi informasi	Monitoring dan evaluasi pelayanan publik												
	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum optimal dilaksanakan	Menyusun matrik kebutuhan pelatihan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing												

		Monev pengembangan kompetensi pegawai secara berkala												
	Penilaian kinerja Individu (SKP) belum sepenuhnya berdasarkan capaian kinerja masing-masing individu	Monev penilaian SKP												
	Reviu perbaikan standar pelayanan belum optimal	Reviu dan perbaikan standart pelayanan												
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	*Punishment* dan *reward* bagi pelaksana layanan dan kompensasi bagi penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar belum ditetapkan	Menyusun usulan penetapan *Punishment* dan *reward* bagi pelaksana layanan												
		Menyusun usulan pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar												
		Monitoring dan evaluasi												
	Inovasi pelayanan publik belum optimal	Menyusun peta/matrik usulan inovasi pelayanan publik												
		Monev inovasi pelayanan publik												
		Evaluasi penanganan keluhan atas pengaduan pelayanan												

	Pelaksanaan sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima belum optimal	Sosialisasi penerapan budaya prima pada seluruh pegawai												
	Penilaian tindak lanjut kepuasan masyarakat terhadap pelayanan belum optimal	Optimalisasi tindak lanjut dan survei kepuasan masyarakat												

Plt.KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA MADIUN

Drs. HERI WASANA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660422 199303 1 007